

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Gelombang musim semi Arab (Arab Spring) telah banyak mengubah konfigurasi politik di Timur Tengah. Gelombang yang di dasari oleh tuntutan akan demokratisasi ini telah melanda sebagian besar negara di Timur Tengah mulai dari Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, sampai Yaman. Selain memicu perubahan peta politik di internal negara-negara yang terkait, gelombang ini juga turut mempengaruhi perubahan situasi di kawasan, salah satunya rivalitas Arab Saudi dan Iran. Guncangan gelombang musim semi arab ini memanaskan kembali rivalitas kedua negara berpengaruh di kawasan tersebut.

Musim Semi Arab (Arab Spring) adalah rentetan gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi didunia Arab, meski tidak semuanya dilakukan oleh orang Arab. Dimulai sejak 18 Desember 2010, telah terjadi revolusi di Tunisia dan Mesir; perang saudara di Libya; pemberontakan sipil di Bahrain, Suriah, dan Yaman; protes besar di Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, dan Oman; dan protes kecil di Kuwait, Lebanon, Mauritania, Arab Saudi, Sudan, dan Sahara Barat. Kerusuhan di perbatasan Israel bulan Mei 2011 juga terinspirasi oleh kebangkitan dunia Arab ini.

Rentetan protes ini terjadi dalam beberapa pola, diantaranya adalah pemberontakan sipil, kampanye yang melibatkan serangan, demonstrasi, pawai, dan pemanfaatan media sosial, seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan Skype, untuk mengorganisir, berkomunikasi, dan meningkatkan kesadaran terhadap usaha-usaha penekanan dan penyensoran Internet oleh pemerintah. Banyak unjuk rasa yang ditanggapi secara keras oleh pihak berwajib maupun militer

dan pengunjuk rasa yang pro-pemerintah. Slogan pengunjuk rasa yang didengungkan di dunia Arab itu adalah Ash-sha`b yurid isqat an nizam (“Rakyat ingin menumbangkan rezim ini”).

Rangkaian peristiwa pada Arab Spring ini berawal dari protes pertama yang terjadi di Tunisia tanggal 18 Desember 2010 menyusul peristiwa pembakaran diri oleh Mohamed Bouazizi dalam protes atas korupsi oleh polisi dan pelayanan kesehatan. Dengan kesuksesan protes di Tunisia, gelombang kerusuhan menjalar ke Aljazair, Yordania, Mesir, dan Yaman, kemudian ke negara negara lain. Sampai September 2012, unjuk rasa ini telah mengakibatkan penggulingan empat kepala negara.

Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali yang kabur ke Arab Saudi, mengakhiri kekuasaannya pada tanggal 14 Januari 2011 setelah protes revolusi Tunisia. Di Mesir, Presiden Hosni Mubarak mengundurkan diri pada 11 Februari 2011, setelah 18 hari protes massal dan mengakhiri masa kepemimpinannya selama 30 tahun.

Pemimpin Libiya Muammar Gaddafi tumbang dari kekuasaannya pada 23 Agustus 2011, setelah Dewan Transisional Nasional (National Transitional Council, NTC) mengambil kendali pada Bab al Azizia sebuah barak militer yang menjadi markas Muammar Gaddafi. Dia terbunuh pada tanggal 20 Oktober 2011, di Sirte kota kelahirannya setelah NTC menguasai kota tersebut. Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh menandatangani persetujuan pengalihan kekuasaan GCC. Dari hasil pemilihan presiden Abd al-Rab Mansur al-Hadi secara formal menggantikannya sebagai presiden Yaman pada 27 Februari 2012.

Berbagai perubahan konfigurasi politik yang di hasilkan gelombang musim semi Arab diatas memicu kecurigaan yang tak berkesudahan antara Riyadh dan Teheran<sup>1</sup>. (dinna Wisnu)

---

<sup>1</sup> Dinna Wisnu, Konflik Tak Bertepi: Arab Saudi vs Iran,” <http://www.koransindo.com/news.php?r=0&n=18&date=2016-01-06>

Mereka saling mencurigai masing-masing melakukan ekspansi kekuatan dan terlibat dalam perebutan pengaruh di kawasan.

Selama hampir enam tahun Arab Spring bergulir dari akhir 2010, Saudi dan Iran telah terlibat dalam bentrok kepentingan di berbagai negara konflik. Bentrokan tersebut terjadi dalam berbagai pola dan intensitas yang berbeda.

Tahun 2011, Arab Saudi mengirimkan tentaranya untuk membantu Bahrain, sekutu dekat yang saat itu dilanda unjuk rasa besar-besaran. Saudi khawatir oposisi Syiah di Bahrain akan bersekutu dengan Iran dengan memanfaatkan situasi itu. Saudi dan Bahrain kemudian menuding Iran sengaja menggerakkan aksi kekerasan terhadap polisi Bahrain. Kawat diplomatik Amerika Serikat yang dibocorkan WikiLeaks menunjukkan bahwa para pemimpin Saudi, termasuk Raja Abdullah, mendorong AS untuk mengambil posisi tegas melawan program nuklir Iran.

Otoritas Saudi menuding sejumlah warga Syiah di Provinsi Timur, termasuk ulama Nimr Baqr al-Nimr yang dieksekusi mati pada 2 Januari lalu, bekerja sama dengan negara asing, merujuk pada Iran, dalam memancing pertikaian, setelah terjadi bentrokan antara polisi dan warga Syiah di kawasan itu. Secara terpisah, AS mengklaim berhasil menggagalkan rencana pembunuhan Duta Besar Saudi untuk AS oleh Iran. Saat itu, otoritas Saudi mengatakan, bukti soal rencana pembunuhan itu sangat banyak dan menegaskan Iran akan mendapat balasannya.

Tahun 2012, Arab Saudi menjadi pendukung utama kelompok pemberontak Suriah yang berusaha menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad, yang merupakan sekutu Iran. Saudi terang-terangan menuding Assad telah melakukan genosida dan menyebut Iran memanfaatkan situasi untuk menduduki Suriah. Iran menuding balik Saudi sebagai pendukung terorisme.

Pada Maret 2015, otoritas Saudi memulai serangan udara di Yaman untuk memerangi pemberontak Houthi, yang merupakan sekutu Iran, yang berniat mengambil alih pemerintahan. Saat itu, Saudi menuding Iran sengaja memanfaatkan Houthi untuk meng kudeta pemerintah Yaman yang kala itu dipimpin Presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi. Lagi-lagi, Iran pun menuding serangan udara Saudi menargetkan banyak warga sipil di Yaman.

Kebijakan luar negeri Arab Saudi selama ini selalu mengedepankan upaya perdamaian, tetapi terkait dengan konflik yang terjadi di Yaman Arab Saudi merupakan salah satu pihak luar yang ikut terlibat dalam konflik internal Yaman. Arab Saudi dan Yaman merupakan dua Negara yang memiliki hubungan sejarah konflik yang panjang, konflik perbatasan tidak terlepas oleh kedua belah pihak terkait dengan sengketa pulau-pulau di Laut Merah. Sebelum berintegrasi, Yaman Utara maupun Selatan memiliki hubungan yang kurang begitu harmonis dengan Arab Saudi. Arab Saudi menganggap keberadaan Yaman Utara yang Republik merupakan ancaman bagi kelangsungan kehidupan kerajaan (royalis) yang dianutnya.

Perang di Yaman antara kelompok Houthi dan pasukan pemerintah Yaman tak bisa lepas dari peta politik perseteruan sengit antara Arab Saudi dan Iran. Rivalitas sektarian antara kaum Sunni dan Syiah dalam perebutan kekuasaan di Yaman juga mulai tampak. Hal itu Nampak dari apa yang dilakukan oleh Arab Saudi pada tanggal 26/3/2015, Arab Saudi dan sembilan negara Teluk resmi meluncurkan agresi militer di Sanaa, Yaman. Mereka berdalih, agresi itu untuk memerangi kelompok Houthi dan menyelamatkan pemerintah sah Yaman di bawah kepemimpinan Presiden Mansour Hadi.

Kelompok Houthi yang didominasi kaum Syiah dikenal sebagai sekutu utama Iran. Pemerintah Iran sendiri belum bereaksi setelah sekutunya di Yaman dikeroyok 10 negara Teluk.

Beberapa pengamat Timur tengah melihat rivalitas Saudi dan Iran ikut mewarnai perang di Yaman. Iran yang hampir mencapai kesepakatan nuklir dengan enam negara kekuatan dunia sudah membuat Arab Saudi resah.

Pemberontakan al-Houthi di Yaman yang terjadi sebenarnya merupakan kelanjutan peristiwa pembantaian Hussein al-Houthi di tahun 2004 silam. Pemerintah Yaman di selatan menuding al-Houthi ingin merubah sistem pemerintahan menjadi Imamah. Sedangkan Houthis yang didukung penduduk Yaman Utara menuding pemerintah Yaman melakukan diskriminasi dan marginalisasi ekonomi di kawasan Sa'da di utara Yaman. Motif ideologis juga berperan. Isu penyeimbangan antara komunitas Salafi dan Zaidi juga tersebar.<sup>2</sup>

Al-Houthi merupakan kelompok pemberontak yang berbasis di Yaman Utara. Pengikut al-Houthi terkenal dengan sebutan Houthis. Nama kelompok Syiah Zaidiyah itu diambil dari nama keluarga al-Houthi, dan Badaruddin al-Houthi termasuk pembesar keluarga itu yang merupakan pengikut Syiah Zaidiyah Jurudiyah dan salah satu ulama besar Syiah di kawasan. Hussein al-Houthi yang merupakan anak dari Badaruddin al-Houthi dan sekaligus pemimpin kelompok pejuang itu, meninggal dunia dalam pertempuran dengan tentara pemerintah Yaman.

Saat ini, kepemimpinan kelompok itu berada di tangan Abdul-Malik al- Houthi, putra dari Hussein al-Houthi. Meleburnya sebagian pengikut Zaidiyah ke dalam barisan pemberontak Houthi, bukan sepenuhnya karena kedekatan ideologi, tapi juga faktor kemiskinan Yaman Utara akibat ketidakadilan pemerintah di Yaman Selatan.

Pada bulan Agustus 2009, tentara Yaman melancarkan serangan besar-besaran yang disebut Operasi Bumi Hangus, untuk menghadapi pemberontakan yang melawan pemerintah

---

<sup>2</sup> “Siapa Suku Houthi di Yaman”, dalam [http://www.sabili.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=771:siapa-suku-houthi-di-yaman&catid=85:lintas-dunia&Itemid=284](http://www.sabili.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=771:siapa-suku-houthi-di-yaman&catid=85:lintas-dunia&Itemid=284), diakses 22 April 2016

Yaman. Sebagian besar pertempuran terjadi di wilayah pemerintahan Sa'dah di barat laut Yaman. Pada 11 Agustus 2011, tentara Yaman melanggar kesepakatan gencatan senjata dan menyerang kelompok al-Houthi. Kebijakan represif pemerintah lewat Operasi Bumi Hangus hingga kini belum mampu menumpas perlawanan kelompok Syiah itu. Di pihak lain, kelompok alHouthi yang menempati dan menguasai kawasan pegunungan di provinsi Sa'dah, utara Yaman berhasil mengontrol 14 kabupaten dari 15 kabupaten di provinsi dan hanya kota Sa'dah yang belum dikuasai oleh kelompok pejuang itu.

Konflik yang terjadi di Yaman merupakan kelanjutan dari pemberontakan Syiah Houthi. Hingga tanggal 21 September 2014, ibukota Yaman, Sanaa jatuh ke tangan Houthi. Februari 2015, Presiden Yaman, Abd Rabbuh Mansour Hadi melarikan diri ke Aden dari ibukota Sanaa. Sebelumnya dia telah disandera sebagai tahanan rumah oleh pemberontak Houthi selama beberapa pekan. Dan pada Maret 2015, Presiden Mansour Hadi mengumumkan pemindahan ibukota dan menjadikan kota Aden sebagai ibukota negaranya. Dia juga menyatakan bahwa ibukota Sanaa telah menjadi "kota yang diduduki" oleh pemberontak Syiah.

Karena desakan separatis Houthi yang kian kuat, akhirnya beliau mengirim surat ke beberapa negara teluk. Surat yang sangat menyentuh. Presiden Manshur Hadi menceritakan kondisi Yaman yang sudah berada di ambang kehancuran, sehingga membutuhkan pertolongan dari "para saudaranya". Presiden menuliskan suratnya dengan sapaan "al-Akh" (saudara) bagi para pemimpin negara teluk.<sup>3</sup>

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Saud al Faisal mengatakan kerajaan Arab Saudi siap untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi krisis politik di

---

<sup>3</sup> "Arab Saudi Siap Lindungi Yaman", dalam <http://www.waspada.co.id/2015/03/27/arab-saudisiap-lindungi-yaman>, diakses 22 Maret 2016

Yaman. Kami ingin melindungi kedaulatan dan legitimasi Pemerintah Yaman yang diwakili oleh Presiden Hadi. Kami berharap krisis itu dapat diselesaikan dengan damai dan kami siap untuk menjawab setiap permintaan Presiden Hadi, apapun itu untuk mendukungnya.

Pemimpin kelompok al-Houthi, Abdul-Malik al-Houthi menyatakan bahwa tentara Arab Saudi sejak awal pecahnya perang saudara di Yaman, aktif membantu pasukan pemerintah Yaman. Dikatakannya, Kebijakan anti warga Yaman yang ditunjukkan oleh pemerintah Arab Saudi bukan masalah baru. Serangan Arab Saudi ke wilayah Yaman dengan dalih memerangi pejuang Syiah memiliki beragam dampak. Pada tingkat pertama, serangan itu merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Yaman dan melanggar aturan internasional.

Aksi sepihak pemerintah Arab Saudi telah meningkatkan solidaritas warga Ahlu Sunnah Yaman terhadap komunitas Syiah Houthi, sebab mayoritas warga Ahlu Sunnah Yaman menganut mazhab Imam Syafii dan memiliki banyak kesamaan dan kedekatan dengan mazhab Syiah. Mereka juga menentang kelompok Wahabi yang menguasai Arab Saudi.<sup>4</sup>

Pada Maret 2015, Arab Saudi melancarkan serangan militer besar-besaran di Yaman untuk memberantas para pemberontak Syiah Houthi. Saudi mengerahkan 100 pesawat tempur dan 150 ribu tentara untuk operasi militer ini. Dalam agresi ini, turut dibantu 8 negara Arab serta dukungan Inggris dan Amerika. Selain itu, pesawat-pesawat dari Mesir, Maroko, Yordania, Sudan, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar dan Bahrain juga ikut serta dalam operasi besar-besaran ini. Kampanye ini tujuannya untuk mencegah para pemberontak Houthi menggunakan bandara-bandara dan pesawat untuk menyerang Aden dan bagian-bagian Yaman lainnya serta mencegah mereka menggunakan roket-roket. Sebelumnya dalam statemen bersama, lima negara Teluk

---

<sup>4</sup> “Intervensi Arab Saudi Dalam Konflik Yaman”, dalam <http://indonesian.ws.irib.ir/ranah/telitik/item/33833-intervensi-arabsaudi-dalam-konflik-yaman?tmpl=component&Print=1>, diakses 22 Maret 2016

Arab: Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain dan Qatar telah memutuskan untuk bertindak melindungi Yaman dari apa yang mereka sebut sebagai agresi milisi Houthi yang didukung Iran.<sup>5</sup>

Rivalitas Saudi dan Iran di Yaman menarik di cermati karena di negara miskin tersebut sikap Saudi begitu keras dengan melakukan kampanye militernya, sikap yang oleh beberapa pengamat di pandang tak lazim mengingat selama ini Saudi cenderung melakukan pendekatan damai dalam menghadapi konflik.

Beberapa pengamat menyebut Iran dan Arab Saudi terlibat dalam perang proksi. Kedua negara tak berperang secara langsung, tapi turut terlibat jauh dalam konflik yang terjadi di negara-negara kawasan. Arab Saudi menyokong penuh rezim Bahrain dan Yaman, sedangkan Iran menyokong pihak oposisi di Bahrain dan Yaman. Iran juga mendukung penuh rezim Suriah, sedangkan Arab Saudi mensponsori pihak oposisi di Suriah.

Merujuk riwayat hubungan Saudi-Iran dan besarnya pengaruh keduanya dikawasan, menarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana Rivalitas Arab Saudi dan Iran Pasca di Yaman Pasca Arab Spring 2011-2016.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengapa Arab Saudi dan Iran begitu gigih bersaing dalam konflik di Yaman, Era Arab Spring 2010-2016?

## **C. Kerangka Teori**

### **1. Sphere of Influence**

---

<sup>5</sup> “Militer Arab Saudi dan 8 Negara Gempur Yaman Harga Minyak Dunia Langsung Naik”, dalam <http://www.jurnalasia.com/2015/03/27/militer-arab-saudi-dan-8-negara-gempur-yamanharga-minyak-dunia-langsung-naik/#>, diakses 17 April 2015



*Sphere of Influence* dalam politik internasional di maknai sebagai klaim dari sebuah negara secara eksklusif atau kontrol yang dominan atas sebuah area atau wilayah asing diluar wilayah yurisdiksinya. Istilah ini mengarah pada klaim politis untuk kontrol yang eksklusif dimana negara lain tidak akan mengakui, atau akan mengarah pada perjanjian hukum dimana negara lain akan menahan diri untuk tidak mengintervensi didalam lingkaran pengaruh yang ada.

Istilah ini mulai populer sejak tahun 1880an ketika ekspansi koloni dari Eropa masuk ke Afrika dan Asia. Tahap akhir dari ekspansi tersebut diwujudkan dalam perjanjian yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar. Perjanjian ini adalah untuk memperkuat lingkaran pengaruh yang ada. Perjanjian antara Inggris dan Jerman pada bulan Mei 1885 adalah yang pertama, menjadi pemisah dan batasan dari pengaruh kedua negara tersebut atas teluk guinea. Perjanjian ini kemudian diikuti oleh beberapa lainnya, yang mana ada pasal VII dari perjanjian antara Inggris dan Jerman pada tanggal 1 Juli 1890 tentang Afrika Timur yang bisa dikatakan serupa. Isinya sbb: Kedua kekuatan tidak akan mengintervensi satu sama lain sebagaimana yang telah disebutkan ada pasal 1-4. Satu kekuatan tidak akan berada pada lingkaran pengaruh kekuatan lain dalam mengakuisisi, membuat perjanjian, mengakui hak atau perlindungan, ataupun menghalangi perluasan pengaruh dari yang lain. Tidak akan ada perusahaan atau individu dari sebuah negara dapat beraktivitas didalam *sphere of Influence* negara lain, kecuali dengan seijin tuan rumah.

Ketika kolonialisme berakhir setelah Perang Dunia II, lingkaran pengaruh hilang artinya pada tingkatan perjanjian formal. *sphere of Influence* pada tingkatan yang lebih longgar atau non-formal mulai terjadi. Sebagai alat dari kekuatan besar atau kerajaan, *sphere of Influence* dapat berguna untuk mengontrol wilayah satelit, dan bisa juga menimbulkan konflik ketika

kekuatan pesaing masuk di wilayah yang sama atau ketika wilayah yang dikontrol melakukan penolakan atas pengaruh yang ada.

Pada masa lampau, konflik antara Roma dan Carthage untuk pengaruh atas Mediterania barat berujung pada Perang Punic yang dimulai pada abad ketiga. Yang lebih baru adalah Doktrin Monroe (1823) memasukkan pengaruh AS di “dunia baru”, kecuali kolonisasi Eropa di Amerika dan upaya awal AS untuk mengintervensi kebijakan dari negara tetangga yang lebih kecil. Setelah Perang Dunia II, Uni Soviet membuat sebuah *sphere of Influence* sebagai fakta politis atas penguasaannya atas negara-negara di Eropa Timur dan Indocina.

## **2. Politik Identitas**

Untuk memahami pertarungan pengaruh Arab Saudi dan Iran di Yaman, selain mengacu pada sejarah politik dan tren kebijakan luar negeri saat ini di Timur Tengah, penting juga untuk mengkaji konsep identitas negara dan pengaruhnya dalam pengambilan kebijakan—terutama dalam hal ini kebijakan luar negeri—yang mendorong suatu negara menempatkan diri dalam rivalitas terhadap negara lain. Banyak pengamat yang melihat persaingan antara Arab Saudi dan Iran cenderung di pengaruhi oleh berbagai perbedaan antara keduanya yang mencakup: Sektarianisme, nasionalisme, ideologi revolusioner, persaingan atas hegemoni regional, politik perdagangan minyak, kebijakan terhadap kehadiran AS di Teluk, dan perselisihan haji.

Berbagai perbedaan identitas politik ini cukup fundamental dalam menjelaskan persaingan Saudi-Iran, pasang surut hubungan antara kedua negara, dan perubahan-perubahan pendekatan dalam kebijakan luar negeri keduanya. Politik identitas di sini mengacu pada anasir-anasir yang mencakup seputar identitas etnis, ras atau agama yang bisa dipakai sebagai klaim yang melegitimasi pemegang kekuasaan dalam memutuskan arah kebijakan negara. Anasir-anasir yang dimaksud melingkupi faktor ideasional dan material yang menunjukkan bagaimana

perubahan identitas negara—terutama dalam wacana kebijakan luar negeri resmi tampak mempengaruhi perubahan kebijakan, dan pergeseran pola persahabatan-permusuhan antara kedua negara.<sup>6</sup>

Penting untuk dicatat bahwa sebuah negara bisa terdiri dari tiga komponen struktural utama: 1) komponen ideasional, yang mencakup cita-cita luhur yang melandasi usaha pemenuhan fungsi dasar pemerintahan untuk menyediakan perlindungan dari ancaman internal dan eksternal, menghadirkan tertib aturan dan menyediakan kebutuhan pokok hidup; 2) Komponen Kelembagaan, yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif yang mengatur sistem dan hukum dasar, prosedur dan norma-norma; 3) komponen fisik, yaitu populasi yang menyediakan potensi sumber daya yang dapat dimobilisasi melalui pembangunan ekonomi dan memberikan kontribusi untuk negara dengan menyediakan modal manusia. Komponen fisik ini juga termasuk wilayah suatu negara dan semua alam resources.<sup>7</sup>

Identitas kolektif menyediakan individu dengan informasi yang mereka butuhkan dalam untuk membentuk opini tentang diri mereka sendiri dan lainnya. Selain itu, identitas terbentuk dalam kaitannya dengan dan dari interaksi dengan lainnya. Proses identifikasi identitas kolektif ini berjalan pada secara berkelanjutan melalui anasir negatif dan positif dan menentukan posisi pandang dalam melihat yang lain. Konsepsi identitas politik menjadi batasan dalam melihat yang lain sebagai liyan atau sebagai bagian dari Identitas yang sama.<sup>29</sup> Identitas kolektif juga memberikan kerangka acuan yang menjadi penuntun arah dalam menentukan tindakan yang akan diambil. Identitas negara mempengaruhi kebijakan luar negeri dan sebaliknya, kebijakan luar negeri pada titik tertentu dapat mempengaruhi identitas negara. Dengan demikian, elit politik

---

<sup>6</sup> Mary Kaldor. *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era*. (Stanford, CA: Stanford University Press, 2007), 80

<sup>7</sup> Barry Buzan, *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post–Cold War Era*. ECPR Classics (Colchester: ECPR Press, 2007), pgs. 83-88

yang berkuasa dapat memanipulasi politik identitas untuk membenarkan kebijakan termasuk perang.<sup>30</sup>

Politik identitas di Timur Tengah berbeda dengan kebanyakan kawasan lain. Di Timur Tengah, selain faktor kesukuan, politik identitas banyak di pengaruhi oleh isu-isu sektarianisme atau yang di sebut Ashabiyah.

*Ashabiyah* adalah suatu konsep yang menjelaskan tentang kecenderungan kesetiaan penduduk suatu negara terhadap suatu aliran tertentu atau keluarga tertentu, misalnya Masyarakat Arab Saudi lebih setia pada keturunan saud atau aliran sunni atau masyarakat Iran Setia terhadap Ideologi Syiah. Dalam konteks rivalitas Arab Saudi dan Iran di Yaman, di Yaman mayoritas masyarakatnya adalah dari aliran syiah houthi sedangkan pemimpinnya dari aliran sunni, maka dalam hal ini syiah houthi yang menjadi mayoritas di yaman, sehingga ada keinginan dari masyarakat yaman dari ideology houthi untuk dipimpin dari itu ideologi, maka untuk mencapai itu mereka melakukan revolusi terhadap pemimpin mereka dalam hal ini dari aliran Sunni.

#### **D. Hipotesa**

Dari uraian Latar belakang, rumusan masalah dan merujuk pada kerangka teori diatas maka dapat diambil Hipotesa:

Arab Saudi dan Iran terlibat secara massif dalam konflik di Yaman karena ada perebutan pengaruh dan kepentingan politik keduanya atas perkembangan situasi di Yaman yang di landasi oleh perbedaan identitas kolektif kedua negara.

## **E. Metodologi**

### **1. Jangkauan Penelitian**

Untuk memudahkan penelitian, penulis akan membatasi jangka waktu antara tahun 2010-2016. Tahun 2010 dipilih sebagai awal penelitian karena pada tahun itulah fenomena *Arab Spring* dimulai yang lantas menumbangkan beberapa rezim otoritarian di negara-negara Timur tengah termasuk Yaman. Sedangkan pada tahun 2016, digunakan sebagai batas akhir penelitian dikarenakan pada tahun itu terjadi puncak dari rivalitas Arab Saudi dan Iran.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan metode deduksi, yaitu dengan mendasarkan pemikiran pada kerangka teori mapan yang digunakan sebagai sarana untuk merumuskan kesimpulan sementara atau hipotesa. Hipotesa yang telah dirumuskan kemudian akan dibuktikan melalui data-data empiris yang tersedia. Penulisan ini bersifat studi kepustakaan atau *Library research* dengan menggunakan media cetak seperti surat kabar, majalah, dan tabloid, serta media elektronik yaitu televisi dan internet. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, dimana data-data dan fakta-fakta yang diperoleh akan dianalisis oleh teori dengan sistematis agar bisa mengorelasikan diantara fakta-fakta tersebut.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan hasil karya tulis yang teratur dan sistematis, maka penulis membagi karya ini ke dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Membahas beberapa hal, pendahuluan yang memuat latar belakang

masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, metodologi penulisan dan pengumpulan data, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Membahas profil, konfigurasi politik, dan perkembangan konflik yang terjadi di Yaman.

Bab III, peenulis akan membahas tentang profil Arb Saudi, Iran, dan riwayat hubungan keduanya.

Bab IV akan menyajikan analisa rivalitas Arab Saudi dan Iran pasca Arab Spring di Yaman dalam rentang 2010-2016.

Bab V merupakan bab terakhir yang akan menutup karya tulis ini, berisi rangkuman dari bab sebelumnya serta disusun dalam bentuk kesimpulan.